

TAJUK RENCANA

Tegas, Tak Ada Revisi UUK DIY

KABAR seputar rencana revisi UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) yang dipublikasikan salah satu media lokal di Yogya 23 Agustus 2024 dan 5 September 2024 sungguh mengejutkan. Ibarat tidak ada hujan tidak ada angin, kabar tersebut tiba-tiba menyeruak dan disebut-sebut bersumber dari anggota Komisi II DPR RI. Pemberitaan pertama berjudul: Presiden Jokowi Siapkan Revisi UUK sedang pemberitaan kedua berjudul 'Pemerintah Belum Berniat Revisi UUK' dengan anak judul 'Izin Prakarsa dari Mendagri Bukan dari Mensesneg'.

Terkait pemberitaan tersebut, pemerintah dalam hal ini diwakili Mendagri Tito Karnavian dan Mensesneg Pratikno melakukan klarifikasi sekaligus koreksi. Mereka telah menghubungi langsung Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menyebut sama sekali tidak ada agenda perhal revisi UUK. Pratikno juga menyatakan dirinya tak pernah menyatakan apapun baik formal maupun informal perhal rencana revisi UUK. Begitu pula Mendagri Tito Karnavian mengatakan tak ada draf atau dokumen apapun dari pemerintah perhal revisi UUK DIY (KR 6/9).

Jika demikian, dari mana sumber berita tentang rencana revisi UUK DIY? Terkait hal ini, media yang memberitakan seputar masalah revisi UUK DIY wajib melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang tersebut. Kita memberi apresiasi yang tinggi kepada Mendagri Tito Karnavian dan Mensesneg Pratikno yang responsif dengan mengirim press release ke KR untuk meluruskan informasi yang tidak benar seputar rencana revisi UUK DIY.

Dalam konteks jurnalistik, apa yang dilakukan Tito Karnavian dan Pratikno adalah bagian dari

upaya meluruskan informasi yang tidak benar, atau dalam perspektif UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dikenal sebagai hak koreksi. Yakni hak untuk melakukan koreksi atau pembetulan atas informasi yang tidak benar. Melalui penjelasan kedua menteri tersebut, kini persoalannya menjadi terang benderang bahwa sama sekali tidak ada rencana, baik dari pemerintah maupun DPR RI untuk melakukan revisi UUK DIY.

Secara teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi terhadap UU, termasuk UUK DIY, bisa saja dilakukan, namun harus dilihat urgensinya. Hemat kita, sejauh ini tidak ada urgensi untuk melakukan revisi UUK DIY, karena secara substansi undang-undang tersebut sudah mengakomodasi berbagai aspek dan kepentingan masyarakat DIY. UUK DIY didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat DIY. Bahwa dalam implementasinya masih ada kekurangan, masih bisa diperbaiki dan disempurnakan. Kita juga menjaga jangan sampai ada anasir-anasir yang mendistorsi makna keistimewaan DIY.

Kalaupun ada kelompok-kelompok yang selama ini menginginkan revisi UUK DIY, perlu kiranya diajak berdiskusi dengan memberi perspektif yang komprehensif, baik terkait aspek filosofis, sejarah, hingga yuridis menyangkut kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, yang berbeda dengan daerah lain. Keistimewaan DIY telah final dan mendapat legitimasi yang kuat dari negara, sehingga tak perlu lagi dipersoalkan. Lahirnya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah melalui proses panjang, alot dan memakan energi yang luar biasa, sehingga membuat kita bersyukur karena aturan tersebut bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat DIY. □-d

Revitalisasi Peran Olahraga untuk Bangsa

SETIAP 9 September kita memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). Tahun 2024 ini peringatan ke-41. HAORNAS lahir bermula dari penyelenggaraan Pekan PON I di Surakarta, 9-12 September 1948. Saat itu, kemerdekaan Indonesia belum diakui penuh oleh masyarakat dunia, termasuk Inggris. Karena itu ketika Inggris menjadi tuan rumah Olimpiade XIV 1948, melarang atlet Indonesia, kecuali menggunakan paspor Belanda. Syarat itu ditolak, atlet hanya akan hadir di Olimpiade jika mewakili Indonesia.

Atas dasar inilah, Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) memutuskan untuk menggelar kompetisi olahraga di dalam negeri yang dikenal dengan PON. Penyelenggaraan PON adalah bukti kepada dunia bahwa Indonesia yang baru merdeka mampu menyelenggarakan kegiatan olahraga skala nasional. PON pertama tahun 1948 sebagai ajang olahraga pasca kemerdekaan, dan 35 tahun kemudian tepatnya 9 September 1983, Presiden Soeharto menetapkan tanggal itu sebagai HAORNAS.

Peran Olahraga bagi Bangsa

Di era Presiden Soekarno, olahraga digunakan sebagai sarana membangun karakter dan jati diri bangsa. Bahkan dijadikan arena memperkuat diplomasi negara lewat kehadirannya di panggung internasional. Pada 9 September 1983 Presiden Soeharto, menerjemahkan isu global keolahragaan pada piagam UNESCO'78, yaitu semboyan "sport for all" selain menetapkan HAORNAS juga meluncurkan semboyan yang melegenda, "mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga", sebagai langkah kongkrit mengajak masyarakat untuk gemar berolahraga.

Di era reformasi yang sudah berusia 26 tahun ini, beberapa pemerintahan belum memiliki visi pembangunan olahraga yang kuat dan jelas, seperti dua kepemimpinan bangsa sebelumnya, meki era reformasi telah menghasilkan dua UU olahraga sebagai landasan pembangunan olahraga nasional. Pengejawantahan UU tersebut lebih diarahkan untuk meningkatkan citra bangsa melalui prestasi olahraga, belum menyentuh bagaimana olahraga sebagai alat perjuangan bangsa untuk menanganai masalah kualitas SDM, seperti membangun karakter generasi muda dan kesehatan masyarakat.

Revitalisasi Pengembangan Olahraga

Memaknai peran olahraga dalam

Dimiyati

pembangunan harus disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat suatu bangsa dan perkembangan olahraga di dunia internasional. Pemahaman itu menjadi urgen agar nilai-nilai olahraga memiliki makna nyata bagi kepentingan bangsa. Selama era reformasi, terutama satu dekade terakhir, olahraga lebih dimaknai untuk citra bangsa, melalui penyelenggaraan event-event akbar, seperti SEA Games, Asian Games, kejuaraan dunia sepakbola, kejuaraan dunia bola basket, dan pembangunan infrastruktur olahraga di antaranya pembangunan sirkuit Manda-



KR-JOKO SANTOSO

lika, JIS, dll. Tidak keliru, karena itu bagian dari upaya membangun prestasi olahraga. Kristiansen & Houlihan (2017), mengingatkan bahwa selain capaian dalam suatu pembinaan olahraga yaitu prestasi, perlu dipahami olahraga adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (*Development Societal Outcome*).

Ke depan perlu ada prioritas lain untuk menjadikan olahraga sebagai sarana membangun bangsa disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan. Setidaknya ada dua tantangan yang dihadapi bangsa ini. Pertama, Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, penuh perbedaan, di balik perbedaan itu sangat rentan terjadinya konflik. Nelson Mandela, negarawan dan mantan Presiden Afrika Selatan, menegaskan olahraga memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, memiliki kekuatan

untuk menginspirasi, memiliki kekuatan untuk menyatukan orang dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain (Mandela, 2010). Gagasan dan makna besar olahraga itu sudah terformulasi dan berkembang dalam program yang disebut "Sport for Development and Peace" yang bertujuan untuk pembangunan perdamaian dan pengurangan konflik, pemberdayaan gender, peningkatan kesehatan dan inklusi sosial serta membangun ketahanan masyarakat (Colison, 2020).

Kedua, data riset kesehatan dasar mengungkapkan peningkatan jumlah proporsi penduduk Indonesia berusia lebih dari 10 tahun yang kurang melakukan aktivitas fisik jumlahnya meningkat dari 26,1% pada tahun 2013 menjadi 33,5% pada tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018). Kecenderungan menurunnya aktivitas fisik tersebut, diperkuat hasil penelitian yang dilaporkan Huang, dkk (2022) bahwa dari 15 negara yang diteliti, anak dan remaja Indonesia memiliki nilai buruk untuk aktivitas fisik dan perilaku pasif umumnya dibanding dengan negara-negara di Asia lainnya. Padahal remaja yang aktif dan secara reguler melakukan aktivitas fisik adalah modal dasar dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa terutama dikaitkan bonus demografi menuju Indonesia emas 2045.

Atas tantangan tersebut para pengambil kebijakan olahraga nasional sudah saatnya merevitalisasi peran olahraga agar bisa dijadikan media untuk mengatasi berbagai masalah riil bangsa. Semoga peringatan HAORNAS tahun 2024 ini yang bersamaan PON XXI di Aceh-Sumut, serta menjelang hadirnya pemerintahan baru presiden Prabowo Subiyanto, bisa menjadi momentum untuk itu semua. □-f

***) Prof Dr Dimiyati Msi, Guru Besar Bidang Ilmu Psikologi Olahraga UNY, Ketua Ikatan Psikologi Olahraga Indonesia (IPO) dan Dewan Pakar Forum Akademisi Sepakbola Indonesia (FAPSI).**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSo.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoelke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSo, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSo, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatini.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langanan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Langkah Preventif terhadap Japanese Encephalitis

DAERAH Istimewa Yogyakarta tengah berfokus melakukan imunisasi *Japanese Encephalitis* (JE) mulai 3 September sampai 31 Oktober 2024 mendatang. Sejauh ini sudah terdapat 13 kasus positif JE di wilayah DIY. Japanese Encephalitis (JE) merupakan salah satu penyakit yang disebabkan virus *Flavivirus*, dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Culex*.

Fokus pemerintah melakukan imunisasi JE perlu dibarengi dengan peran serta masyarakat. Pencegahan menjadi langkah kunci untuk meminimalisir penyebaran penyakit ini. Di antara berbagai langkah preventif yang tersedia, pengelolaan lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pencegahan gigitan nyamuk menjadi dua pilar utama yang sangat krusial.

Pengelolaan Lingkungan

Nyamuk *Culex*, yang menjadi vektor penularan JE, memiliki kecenderungan berkembang biak di tempat-tempat yang memiliki genangan air seperti sawah, kolam, saluran air yang tersumbat, dan berbagai area lembab lainnya. Karena itu, pengelolaan lingkungan adalah langkah preventif yang paling dasar dan penting. Memastikan tidak ada genangan air yang bertahan di sekitar pemukiman dapat mengurangi populasi nyamuk secara signifikan.

Namun, implementasi pengelolaan lingkungan ini memerlukan komitmen yang konsisten dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Kampanye untuk membersihkan tempat-tempat umum, memperbaiki saluran air yang tersumbat, serta memastikan kebersihan halaman rumah harus menjadi prioritas. Di kawasan pedesaan, di mana risiko JE lebih tinggi karena kedekatan dengan habitat alami nyamuk, edukasi masyarakat tentang pentingnya mengelola sawah, kolam, dan area pertanian dengan cara yang aman juga sangat penting.

Selain itu, tindakan pencegahan di tingkat komunitas, seperti program "kerja bakti" yang melibatkan seluruh warga, dapat menjadi solusi efektif un-

Kurnia Ifah Nur Wulandari

tuk mengelola lingkungan secara kolektif. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan lingkungan sebagai upaya preventif. Jika pengelolaan lingkungan berjalan baik, tidak hanya JE yang dapat dicegah, tetapi juga berbagai penyakit lain yang ditularkan melalui nyamuk, seperti demam berdarah dan malaria.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Selain pengelolaan lingkungan, salah satu tantangan terbesar dalam pencegahan JE adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Banyak orang di wilayah endemik tidak sepenuhnya memahami bagaimana JE ditularkan atau langkah-langkah sederhana yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri dan keluarga.

Karena itu, edukasi masyarakat menjadi sangat penting. Kampanye kesehatan yang masif, baik melalui media massa maupun sosialisasi langsung, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melindungi diri dari gigitan nyamuk. Penggunaan kelambu saat tidur, terutama bagi anak-anak yang lebih rentan terhadap gigitan nyamuk, harus didorong secara intensif. Penggunaan krim anti-nyamuk dan pakaian pelindung, terutama saat berada di luar rumah pada malam hari ketika nyamuk *Culex* lebih aktif, juga menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mencegah gigitan nyamuk.

Di samping itu, edukasi harus mencakup informasi tentang gejala awal JE, sehingga masyarakat dapat segera mencari bantuan medis jika diperlukan. Pengetahuan tentang gejala seperti demam tinggi,

sakit kepala, dan kejang harus dipahami secara luas, sehingga kasus-kasus JE dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani dengan cepat. Pemerintah dan lembaga kesehatan dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menyebarkan informasi ini, mulai dari poster di fasilitas kesehatan hingga penyuluhan langsung di komunitas.

Pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah dua langkah preventif yang sangat penting dalam menghadapi ancaman Japanese Encephalitis. Kedua langkah ini, jika dilaksanakan dengan baik dan konsisten, dapat mencegah penyebaran penyakit serta melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan yang lebih besar. Karena itu, pencegahan JE harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif dari setiap lapisan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah. Dengan kolaborasi yang solid, risiko penyebaran *Japanese Encephalitis* dapat ditekan, dan kesehatan masyarakat dapat terjamin dengan lebih baik. □-f

***) Kurnia Ifah Nur Wulandari, Pranata Laboratorium Kesehatan UPTD Puskesmas Minggir Sleman.**

Pojok KR

Polda DIY bakar 3 hektare ladang ganja di Aceh.

-- Menyelamatkan generasi muda.

Dewas KPK beri sanksi sedang kepada Nurul Ghufron.

-- Masih dipertanyakan efektivitasnya.

KPK setor Rp 40,5 miliar, uang rampasan Rafael Alun.

-- Jangan-jangan masih ada yang disembunyikan.

Berita